

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang keberadaannya sangat strategis, karena masalah pendidikan ini akan berkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akhir-akhir ini masalah pendidikan muncul kepermukaan dengan isu rendahnya kualitas atau mutu pendidikan Indonesia bahkan mutu pendidikan Indonesia disinyalir berada pada ranking ke seratus dua (102) dunia dan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat terbawah. Ini merupakan suatu realita yang harus direspon oleh kita sebagai bangsa Indonesia khususnya kita sebagai pendidik. Rendahnya mutu pendidikan itu, tentu banyak faktor yang menyebabkannya antara lain, unsur kurikulum yang terlalu sentralistik, dana anggaran yang kurang memadai, profesionalisme guru yang masih rendah, dan banyak faktor lainnya. Di antara faktor-faktor itu yang akan banyak terkait dengan penelitian ini adalah faktor kurikulum dan profesionalisme guru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PPKn.

Lahirnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini secara filosofis bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan secara konstitusional diarahkan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam sejarah perkembangannya, bahwa PKN/PPKn ini telah disalahgunakan oleh penguasa baik selama Orde Lama maupun Orde Baru. PKN/PPKn sebagai

program pendidikan politik pada tingkat persekolahan “telah bergeser dari kualifikasi program pendidikan politik menjadi program indoktrinasi politik” (A. Kosasih Djahiri,2002:90), yang sarat dengan muatan kepentingan politik penguasa. Hal ini tentu sudah tidak sesuai lagi dengan misi PKN/PPKn. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan dalam kurikulum PKN/PPKn. Di dalam kurikulum tahun 1994, GBPP PPKn (Suplemen 1999) dinyatakan bawa misi PPKn adalah sebagai berikut :

PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan “sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa” (Dikbud; 1995:7).

Berdasarkan pengertian PPKn sebagaimana tersebut di atas, maka melalui mata pelajaran PPKn ini diharapkan bangsa kita khususnya peserta didik mampu mengembangkan nilai-nilai budaya sendiri serta berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu tugas dan tanggung jawab khususnya guru PPKn untuk mengembangkan proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter mata pelajaran PPKn itu sendiri. Upaya ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena hal ini menuntut keprofesionalan dari para pendidik itu sendiri khususnya guru PPKn .

Bukan suatu rahasia lagi, bahwa pembelajaran PPKn slama ini lebih menitik beratkan pada tekstual daripada kontekstual dan diberikan secara indoktrinasi schingga pembelajaran PPKn hanya terjadi informasi dan komunikasi satu arah, di mana siswa pasif dan hanya mendengarkan apa yang diceramahkan

oleh guru, akibatnya siswa hanya memperoleh materi yang sifatnya hafalan saja yang tidak banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan gagasan atau pikiran-pikirannya. Dengan pendekatan pembelajaran seperti itu akan sulit untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn termasuk dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Fungsi PPKn sebagai sarana untuk membentuk kepribadian seseorang masih belum dipahami sepenuhnya. Padahal jika ditinjau dari hakikatnya bahwa PPKn itu adalah untuk membangun dan membina kepribadian serta moral bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan persatuan untuk pembangunan manusia yang mampu bersaing dan memiliki kualitas unggul di era globalisasi ini. Jika pengajaran PPKn benar-benar konsisten dengan tujuannya, maka akan tampak sumbangannya dalam pembentukan kepribadian dan menanamkan kekuatan moral (moral force) secara utuh. Keterbatasan dalam menafsirkan kurikulum menyebabkan guru merasa tidak perlu menggunakan strategi yang bervariasi, sehingga peserta didik dijadikan objek belajar secara total dan bukan sebagai subjek yang perlu ditumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara utuh.

Selain itu, seringkali fokus perhatian guru PPKn tidak selalu sejalan dengan fokus perhatian siswa, akibatnya apa yang dijadikan pembelajaran oleh guru di kelas kurang mendapat respon dari siswa, sehingga pembelajaran PPKn membosankan bagi siswa. Proses belajar-mengajar terjadi manakala ada interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru memerankan fungsi sebagai pengajar, sebagai fasilitator dan sebagai evaluator, sedangkan siswa berfungsi sebagai individu yang belajar. Fungsi itu

harus mengacu pada tujuan yang sama yaitu memanusiakan siswa secara operasional yang tercermin dalam tujuan pendidikan dan tujuan pengajaran/instruksional.

Selama ini proses belajar-mengajar PPKn disinyalir lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa ini pun masih bersifat kognitif rendah, padahal karakter mata pelajaran PPKn ini lebih terfokus pada aspek afektif dan psikomotor. Akibatnya guru hanya banyak memberikan materi pembelajaran yang sifatnya hafalan, sementara aspek afektif tidak tersentuh apalagi aspek psikomotor. Oleh karena itu, tidak heran apabila perilaku siswa tidak berubah ke arah yang diharapkan, begitu juga kemampuan berpikir kritis siswa kurang nampak. Apabila fenomena seperti itu yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran PPKn telah gagal mengembangkan potensi siswa sebagai makhluk berpikir. Oleh karena itu, sangat perlu adanya pembaharuan dalam pembelajaran PPKn.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut A. Kosasih Djahiri (2002:93) bahwa *“salah satu pembaharuan dalam PPKn 1999 (PKN baru) ialah pola/strategi pembelajarannya, di mana siswa bukan hanya belajar tentang hal-hal (materi pelajaran) PKN melainkan juga belajar ber-PKN atau praktek, dilatih uji coba dan mahir serta mampu membakukan diri, bersikap, perilaku sebagaimana isi pesan PKN”*. Jadi, dalam pembelajaran PPKn itu bukan hanya memberikan informasi yang bersifat kognitif semata, akan tetapi harus lebih menitik beratkan pada aspek afektif dan psikomotor. Hal inilah yang sampai sekarang belum mampu dilaksanakan oleh guru secara optimal sehingga

pembelajaran PPKn hampir tidak ada bedanya dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya, padahal PPKn ini mempunyai karakter berbeda dengan mata pelajaran lain, akibatnya kualitas PPKn hanya dilihat dari segi kognitif siswa semata. Hal ini jelas tidak relevan dengan harapan kurikulum PPKn itu sendiri.

Berpijak dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan judulnya adalah : Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran PPKn.

B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pembelajaran PPKn dewasa ini dilihat dari pendekatan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa SMA.

2. Fokus Masalah Penelitian

Masalah pokok di atas, nampaknya akan menyangkut berbagai aspek secara meluas, maka untuk terarahnya studi ini, penulis membatasi masalahnya pada penelitian tentang bagaimana proses pembelajaran PPKn yang tepat dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Kabupaten Bandung , dengan fokus masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah proses pembelajaran PPKn dewasa ini akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?

- b. Kekuatan apa yang ada pada pembelajaran PPKn dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- c. Apa kelemahan yang ada pada pembelajaran PPKn dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis merumuskan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan merumuskan gagasan konseptual dan operasional pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pembelajaran PPKn yang tepat dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pembelajaran PPKn dilihat dari pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa SMA.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masukan dalam pengembangan pembelajaran PPKn di sekolah dan juga sebagai bahan

masukannya untuk para pelaku pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran PPKn

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan data awal dalam penelitian lebih lanjut yang relevan terhadap variabel-variabel yang belum tersentuh dalam penelitian ini. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai kajian untuk masukan pada LPTK, guru, atau lembaga-lembaga yang memerlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn.

E. Kerangka Pemikiran

1. Batasan Konseptual

Batasan konseptual yang merupakan bagian dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional dan keberadaannya sangat penting dan strategis, karena pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3 UU No.20 tahun 2003)
- b. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, estetis, dan demokratis, serta memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4 UU No. 20 tahun 2003).



Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 UU NO. 20 tahun 2003). Sedangkan menurut A. Kosasih Djahiri (1996:4) adalah *“upaya pembermaknaan seluruh potensi manusia”*. Makna pendidikan ini didasarkan pada hakikat manusia itu sendiri, yang mana *“setiap orang lahir dengan membawa potensi kodrati anugerah dan amanah Illahi (yang bermakna titipan untuk dibina dipelihara, dikembangkan dan dibermaknakan sebagaimana ketentuannya)”*

- d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah *“mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”*. (Dikbud; 1995 : 7).
- e. Kualifikasi PPKn *“bukan saja menuntut manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, berkehidupan modern setara dengan bangsa-bangsa lain, tetapi dia harus tetap berkepribadian Indonesia dan berjiwa Pancasila. Ini bermakna bahwa pola pikir, zikir dan perbuatannya harus berlandaskan nilai-moral dan norma budaya Indonesia dan Pancasila”*. (A. Kosasih Djahiri; 1996:10). Dengan melihat kualifikasi PPKn seperti itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan guru PPKn sangat berat, karena akan berhadapan

bahwa tantangan guru PPKn sangat berat, karena akan berhadapan dengan pengaruh budaya asing yang cukup deras sebagai akibat era globalisasi dunia.

- f. Dalam menjawab tantangan zaman tersebut, guru PPKn belum banyak melakukan inovasi dalam pembelajarannya, sehingga metode pembelajaran yang diterapkannya pun tidak banyak mengalami perubahan, yaitu sebatas mengajarkan dengan metoda tradisional (ceramah), dan bukan membelajarkan siswa, sehingga potensi siswa tidak terangkat, akibatnya siswa kurang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap segala permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, begitu juga dengan penggunaan media dan evaluasi pembelajarannya.
- g. Hakikat pembelajaran (secara prosedural) adalah rekayasa terjadinya proses keterlibatan seluruh potensi diri siswa. Potensi/keterampilan/kemampuan belajar yang meliputi kognitif-afektif dan konatif psikomotorik dengan perolehan belajar yang utuh-menyeluruh meliputi data, fakta, konsep, teori, dalil, hukum berikut isi pesannya (nilai-moral) yang tersirat di dalamnya serta kemahiran mengimplementasikan/melaksanakannya (A. Kosasih Djahiri, 2003:35).
- h. Secara luas, pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses keterlibatan (engagement) totalitas diri siswa dan kehidupannya/lingkungannya (learning environment) secara terarah-terkendali (conditioned) ke arah penyempurnaan, pembudayaan, pemberdayaan totalitas diri dan kehidupannya melalui proses learning to know, learning to belief, learning to do and to be serta learning to live together (A. Kosasih Djahiri, 2004:6)



Pembelajaran PPKn merupakan suatu aktivitas para peserta didik sebagai akibat dari adanya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengajar dan siswa. Kegiatan ini terdiri dari tiga fase yaitu “*informasi, transformasi, dan evaluasi*” (S. Nasution; 1983:9). Ketiga fase tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran PPKn.

- j. Kemampuan berpikir kritis yaitu “keterampilan untuk mengakui, menganalisis dan mengevaluasi. Berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Berpikir kritis adalah keterampilan berpikir, merespon merupakan sarana penyusunan yang baik, karena, (a) berpatokan pada suatu kriteria, (b) dapat mengoreksi sendiri, (c) kepekaan untuk memahami suatu konteks. Pada prinsipnya seseorang yang berpikir kritis adalah orang yang terampil penalarannya, memiliki kecenderungan untuk mempercayai dan bertindak sesuai dengan penalarannya” (Suryati; 2000:11). Jadi, yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa adalah kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Menggunakan proses-proses berpikir yang mendasar berupa penalaran yang logis atau masuk akal, sehingga dapat memahami, mengakui, menganalisa dan mengevaluasi. Dapat menginterpretasikan suatu argumen sesuai dengan penalarannya untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan.

2. Pertanyaan penelitian

Fokus Masalah 1 : Apakah proses pembelajaran PPKn dewasa ini akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan dalam beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah guru dan siswa memahami tentang konsep PPKn ?
- b. Apakah pengorganisasian materi pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru PPKn akan mampu mengembangkan berpikir kritis pada siswa ?
- c. Apakah kondisi proses pembelajaran PPKn dewasa ini cukup mendukung untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- d. Metoda apa yang banyak diterapkan oleh guru PPKn dalam proses pembelajarannya ?
- e. Apakah metoda pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ?
- f. Apakah media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn akan mampu mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- g. Apakah evaluasi yang digunakan oleh guru PPKn akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ?

Fokus Masalah 2 : Kekuatan apa yang ada pada pembelajaran PPKn dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?

Dari fokus masalah tersebut, dikembangkan dalam beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah isi kurikulum PPKn 1994 cukup mendukung dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- b. Apa potensi kekuatan yang dimiliki oleh guru dalam pembelajaran PPKn ?
- c. Kekuatan apa yang ada dalam pembelajaran PPKn dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- d. Apakah kondisi lingkungan sosial budaya sekolah cukup mendukung terhadap pembelajaran PPKn guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ?

Fokus Masalah 3 : Apa kelemahan yang ada pada pembelajaran PPKn dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ?

Dari fokus masalah tersebut, dikembangkan dalam beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Apa kelemahan yang ada pada guru dalam pembelajaran PPKn dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis ?
- b. Apa kelemahan proses belajar mengajar PPKn dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa ?
- c. Apa kelemahan kondisi lingkungan sosial budaya sekolah untuk pembelajaran PPKn guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ?

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan

dan merumuskan gagasan konseptual dan operasional pengembangan berpikir kritis melalui pembelajaran PPKn. Maka untuk mencapai sasaran itu, diperlukan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada upaya dihasilkannya suatu solusi praktis dan kontekstual tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat teoritik. Berdasarkan pada pertimbangan teoritis dan praktis, maka metode penelitian yang dianggap tepat adalah metode kualitatif. Menurut S. Nasution (1996:18) bahwa :

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

Sesuai dengan pendirian penelitian kualitatif, bahwa tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu sangat kompleks dan tak ada satu teori yang dapat menangkapnya, maka metode kualitatif ini sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti ini menyangkut masalah sosial yang sulit untuk diukur secara kuantitatif berdasarkan alat-alat ukur. Oleh karena itu, alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu pedoman observasi, kuesioner, dan pedoman wawancara.

Dalam pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan prosedur sebagai berikut :

1. Menyeleksi atau memilih data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Data yang diperoleh dikelompokkan agar mempermudah dalam menyimpulkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian, sehingga pengolahannya dapat dengan mudah dilaksanakan.
3. Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian ditabulasikan atau dituangkan ke dalam bentuk tabel, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisisnya.
4. Sumber data dikelompokkan yang terdiri dari :
 - a. Data dari hasil wawancara dengan para pakar pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan.
 - b. Data dari hasil wawancara dengan guru-guru PPKn/PKN.
 - c. Data dari hasil observasi ke sekolah.
5. Data hasil wawancara dengan para pakar pendidikan itu dihubungkan dengan data hasil wawancara dengan guru PPKn/PKN dan data hasil observasi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.